

## ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU PADA TAHUN 2045

Sigit Adi Triyanto<sup>1</sup>, Sanuri<sup>2</sup>, Muhammad Syukron<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu  
sigitdilan97@gmail.com  
sanuri@staisdharma.ac.id  
minatansyukron@gmail.com

---

DOI : <https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>

---

Disubmit: (Januari 2022) | Direvisi: (Januari 2022) | Disetujui: (Januari 2022)

### *Abstract*

The 2024 State Budget (APBN) aims to accelerate inclusive and sustainable economic transformation by increasing productivity and realizing high-value-added economy. To achieve Advanced Indonesia 2045, two main strategies are implemented: short-term and medium-long-term. The short-term focus is to strengthen the economic foundation through controlling inflation, eradicating extreme poverty to 0-1% by 2024, reducing stunting prevalence to 14%, and boosting investment. High economic growth cannot rely solely on household consumption but requires substantial investment. In the medium-long term, the strategy includes addressing gaps in human resources, infrastructure, and institutions. The government focuses on developing superior human resources through education, health, and social protection programs, while also pursuing infrastructure development targets in information technology, energy, and food sectors. Institutional reforms are conducted by improving quality public services and bureaucratic reform. The 2024 APBN prioritizes education, health, social protection, food security, infrastructure, and maintaining legal and security stability. The 2024 APBN also supports the development of the new capital city (IKN), simultaneous elections, reducing stunting prevalence, and improving the welfare of civil servants (ASN), military (TNI), police (Polri), and retirees through salary and pension increases.

**Keywords:** Economic Development, Indonesia, Advanced Nation.

### **Abstrak**

APBN 2024 bertujuan mempercepat perubahan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan dengan meningkatkan produktivitas dan realisasi ekonomi bernilai tambah tinggi. Untuk mencapai Indonesia Maju 2045, dua strategi utama diterapkan: jangka pendek dan jangka menengah panjang. Fokus jangka pendek adalah memperkuat fondasi ekonomi melalui pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0-1% pada 2024, penurunan prevalensi stunting menjadi 14%, serta peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, tetapi juga investasi besar. Dalam jangka menengah panjang, strategi mencakup penanganan kesenjangan SDM, infrastruktur, dan institusi. Pemerintah fokus mengembangkan SDM unggul melalui pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial, serta mengejar target pembangunan infrastruktur di sektor teknologi informasi, energi, dan pangan. Reformasi institusional dilakukan dengan meningkatkan layanan publik berkualitas dan reformasi birokrasi. APBN 2024 diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan,

perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, serta menjaga kestabilan hukum dan keamanan. APBN 2024 juga mendukung pembangunan IKN, penyelenggaraan pemilu serentak, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan kesejahteraan ASN/TNI/Polri serta pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok.

**Kata Kunci:** Pembangunan Ekonomi, Indonesia, Negara Maju.

## Pendahuluan

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berbagai reformasi yang telah dilakukan (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023), Indonesia berambisi untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045, tepat 100 tahun setelah kemerdekaannya. Visi Indonesia Maju 2045 ini merupakan tonggak penting yang memerlukan upaya dan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk ketimpangan regional, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan, infrastruktur yang belum merata, dan reformasi institusional yang mendesak (Bank Indonesia (BI), 2023). Tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui perencanaan dan implementasi kebijakan yang efektif dan inovatif.

Salah satu strategi utama yang ditempuh pemerintah adalah meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi. Hal ini melibatkan transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung transformasi ini, diperlukan investasi yang signifikan dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan institusi.

Pemerintah telah menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan ini. Strategi jangka pendek fokus pada penguatan fondasi ekonomi melalui pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Sementara itu, strategi jangka menengah dan panjang mencakup pengembangan SDM unggul, pembangunan infrastruktur modern, dan reformasi institusional yang menyeluruh.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi berbagai hambatan, Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai negara maju yang inklusif, berkelanjutan, dan sejahtera.

Penelitian tentang analisis pembangunan ekonomi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045 memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dalam beberapa dekade mendatang (World Bank, 2022). Salah satu alasan utama urgensinya adalah kebutuhan untuk memahami dan mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada

kesenjangan sosial, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Dengan penelitian yang mendalam, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan ini serta strategi yang efektif untuk menguranginya.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai visi Indonesia Maju 2045 (Asian Development Bank (ADB), 2023). Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas berbagai program pendidikan dan pelatihan yang telah dan akan dijalankan, serta untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja di masa depan (Resosudarmo & Abdurohman, 2018).. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa generasi mudanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk bersaing di kancah global.

Infrastruktur juga menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai sejauh mana pembangunan infrastruktur saat ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan apa saja hambatan yang perlu diatasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan (Sugiharto, 2019). Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas antar daerah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung perkembangan industri dan sektor ekonomi lainnya (Hill, & Tabor, 2018).

Reformasi institusional juga tidak kalah penting. Untuk mencapai status negara maju, Indonesia memerlukan institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel (Purnomo, 2020). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik dapat dioptimalkan untuk mendukung tujuan pembangunan. Identifikasi kelemahan dan pengembangan strategi untuk memperkuat institusi akan menjadi langkah kunci dalam perjalanan menuju Indonesia Maju 2045.

Secara keseluruhan, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang berdasarkan data dan analisis yang komprehensif. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mencapai visinya sebagai negara maju pada tahun 2045, yang tidak hanya berdaya saing tinggi tetapi juga sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis pembangunan ekonomi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam upayanya mencapai status negara maju (Rofiqoh & Zulhawati, 2020).

Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk memahami secara mendalam konteks sosial, budaya, dan kebijakan yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, akademisi, praktisi ekonomi, dan masyarakat umum. Selain itu, focus group discussion (FGD) akan diadakan untuk menggali perspektif berbagai pihak mengenai strategi

pembangunan ekonomi. Analisis kualitatif ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor non-ekonomi yang berpengaruh serta memberikan wawasan mengenai implementasi kebijakan yang ada (Rasyid, 2022).

Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data statistik yang relevan dengan pembangunan ekonomi. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga internasional akan dikumpulkan dan dianalisis. Metode statistik deskriptif dan inferensial akan digunakan untuk mengevaluasi indikator ekonomi seperti pertumbuhan PDB, tingkat investasi, inflasi, kemiskinan, dan prevalensi stunting (Yin, 2018). Selain itu, analisis regresi akan digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel ekonomi dan pembangunan, serta untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan data historis.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan tahunan, jurnal akademik, dan publikasi pemerintah. Kedua, data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dan FGD. Teknik purposive sampling akan digunakan untuk memilih responden yang relevan dan memiliki wawasan mendalam mengenai topik penelitian.

Data kualitatif akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang melibatkan pengkodean data dan pengidentifikasian tema-tema utama yang muncul. Sementara itu, data kuantitatif akan dianalisis menggunakan software statistik seperti SPSS atau STATA. Hasil analisis kualitatif dan kuantitatif kemudian akan dibandingkan dan dikombinasikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, triangulasi data akan dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Uji validitas internal dan eksternal juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat diandalkan dan berlaku umum.

Dengan metode penelitian yang holistik ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Mengendalikan Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya (Times, I. D. N., 2020). Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang (Elfansyah, 2006). Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan

inflasi (Gischa, 2020). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga (Ulya, 2020). Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang dilakukan melalui Bank Indonesia (bank sentral) tujuannya menjaga kestabilan moneter agar kesejahteraan rakyat meningkat.

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan moneter, ada 3 (tiga) cara yang dilakukan dalam kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut: (a) Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, (b) Menaikkan tarif pajak, (c) Mengadakan pinjaman pemerintah

Kebijakan ini bisa ditempuh dengan cara berikut: (a) Menaikkan hasil produk antar tingkat konsumsi bertambah, sehingga akan menambah uang beredar, (b) Kebijakan upah yang disepakati dengan serikat-serikat buruh agar tidak terjadi banyak tuntutan selama inflasi, (c) Pengawasan dan penetapan harga karena pengawasan yang tidak intensif dapat menimbulkan pasar gelap (*black market*).

### **1. Pengendalian Kemiskinan**

Kemiskinan berawal dari faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sebab utama keluarnya bangsa Indonesia dari falsafah Pancasila. Esensi dari falsafah Pancasila telah disalahgunakan. Kita bisa lihat seperti kepercayaan kepada Tuhan YME, yang diharuskan oleh agama telah berubah menjadi sumber konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Arsyad dan Lincon, 1999). Lalu nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, sudah jauh dilanggar oleh bangsa ini, yang mengakibatkan keadilan sosial menjadi jauh dari kenyataan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari aktifitas sehari-hari yang terjadi di lingkungan kita antara lain, menjamurnya pasar-pasar modern (mall, swalayan dll) yang membuat tergusurnya pasar tradisional sebagai tempat dan sumber penghidupan masyarakat kecil. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi suatu upaya yang mutlak harus dilakukan. Kemampuan "tahan banting" terhadap krisis telah terbukti (Parwoto, 2001). Mengingat relatif sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dari investasi usaha-usaha besar maka pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan potensi yang tersembunyi termasuk di dalamnya UKM dan sektor informal untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan (Rosyidi dan Suherman, 2006). Sektor ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan di saat krisis, oleh karena itu pemerintah jangan menganggap remeh akan keberadaan sektor ekonomi rakyat, tapi

justro harus 17 diberdayakan sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional (Todaro dan P. Michael, 2000).

### 1. Investasi dan Arah Kebijakan

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai "*engine of growth*". Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi.

Lebih jauh Harrod-Domar menekankan pentingnya setiap perekonomian menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal.

Dalam teori ini menekankan bahwa investasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam tataran pembangunan perekonomian suatu negara. Disebutkan juga bahwa ada persyaratan tertentu agar pertumbuhan yang mantap (*steady state growth*) dapat tercapai dan pembangunan tidak tersendat-sendat.

Dengan mengambil studi kasus pada perekonomian negara maju, teori Harrod-Domard menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang (*long-term*). Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai *steady-state growth* atau pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil.

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan.

Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa.

Di sisi lain, perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Sejalan dengan berbagai argumentasi tersebut, sejatinya Indonesia telah memiliki peta jalan yang akan mengantarkan Indonesia menjadi Negara maju, sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato "Visi Indonesia" di Sentul International Convention Center (SIIC), Minggu (14/7), yang memaparkan visinya dalam membawa kapal besar Indonesia menuju kemajuan agar sejajar dengan Negara-negara maju lainnya diantaranya dengan focus kepada upaya peningkatan investasi di Indonesia.

Langkah strategis tersebut perlu didukung keberlanjutannya karena berkembangnya investasi di Indonesia akan memiliki efek berganda terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif, hal ini sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia berlabuh menuju negara maju yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman.

Kita patut bersyukur kerja keras seluruh komponen bangsa dengan direktif yang terarah dan terukur tahapan demi tahapan telah berhasil kita lalui dalam membangun pondasi kemajuan bangsa, tercermin dari kemudahan berinvestasi di Indonesia untuk mengungkit Bergeraknya investasi telah banyak mengalami perbaikan yang berarti.

Menurut laporan Bank Dunia, berdasarkan kategori *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia berada pada peringkat 72 dari 190 negara. Sinyal tumbuhnya investasi di Indonesia dapat dirujuk dari laporan World Investment Report 2018, yang menggambarkan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) ke Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Disamping itu Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) pada tahun 2019 ini mempertahankan peringkat sovereign credit rating Indonesia pada level BBB/outlook stabil (Investment Grade), penegasan rating Indonesia tersebut mencerminkan keyakinan lembaga rating atas perekonomian Indonesia dan resiliensi sektor eksternal Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Kita juga patut berlega hati ditengah kondisi perekonomian global yang semakin tidak menentu, pencapaian yang cukup gemilang terlihat dari realisasi investasi penanaman modal Indonesia. Selama triwulan II tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 95,6 triliun (naik 18,6%) dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 104,9 triliun (naik 9,6%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Pada kuartal I 2019, realisasi investasi tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,3 persen dibandingkan dengan kuartal I 2018 menjadi Rp195,1 Triliun.

Bila ditarik rentang waktu kebelakang investasi tumbuh hampir 6 kali lipat dari tahun 2016 ke 2018, yang pada awalnya hanya sebesar 3,92 miliar dollar AS menjadi 23 miliar dollar AS. Diharapkan ke depan Indonesia mampu menembus 40 besar dalam peringkat kemudahan investasi di dunia pada tahun 2019. Untuk itu diperlukan adanya kesepemahaman dan kerja keras dari seluruh Kementerian/Lembaga untuk dapat melakukan pemangkasan terhadap 50 persen dari 42 ribu regulasi yang dianggap masih menghambat proses investasi masuk ke dalam negeri.

Pemerintah Indonesia sadar terhadap pentingnya mengutamakan perbaikan infrastruktur agar iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama sebagai fondasi pembangunan yang akan terus ditingkatkan, utamanya terkait dengan utama menyambungkan ke sentra-sentra ekonomi produktif, sehingga masalah distribusi tidak lagi menjadi kendala pertumbuhan ekonomi regional.

Berbagai proyek-proyek infrastruktur yang massif telah berhasil dikembangkan di berbagai penjuru Indonesia, beberapa proyek pembangunan tersebut, antara lain, Pembangunan Blok Masela di Maluku Tenggara Barat (MTB) yang diharapkan dapat meningkatkan cadangan migas Indonesia sebesar 300 persen, peningkatan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (padat karya), pembangunan irigasi kecil, pengembangan air mium dan sanitasi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kemudian, preservasi jalan Lintas Timur, Barat, dan Tengah Sumatera, serta peningkatan preservasi jalan Trans Papua untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan bahan pokok dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Tingkat kemajuan infrasruktur suatu negara mencerminkan efisiensi perekonomian dari negara itu sendiri. Saat kondisi infrastruktur di sebuah negara lemah dapat berakibat pada tingginya biaya logistik untuk kegiatan bisnis, termasuk perdagangan. Selain itu, industri tersebut akan kehilangan daya saing. Pembangunan infrastruktur dan perkembangan makro ekonomi memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif dan menciptakan efek pengganda dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menyerap peningkatan aliran barang dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara langsung dapat berpengaruh kepada pengurangan tingkat pengangguran dan kesenjangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan upaya akselerasi perbaikan dan pembangunan investasi, terutama dalam bidang infrastruktur, yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat tersambung sentra-sentra ekonomi



produksi, investasi infrastruktur yang tepat merupakan poin penting dari produktivitas dan prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, sektor swasta masih merupakan investor yang memiliki potensi besar untuk membantu proses percepatan perkembangan infrastruktur di Indonesia. Landasan utama dari fokus kerja ini adalah untuk membuka aset infrastruktur yang ada ke sektor swasta, yakni melalui produk seperti pasar obligasi proyek dan sekuritisasi utang.

Kita tentunya masih perlu terus memadukan langkah dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun sinergitas dalam mendukung satu visi meningkatkan kualitas investasi dan keseimbangan penyebaran investasi, utamanya pada sektor riil yang padat karya. Hilirisasi industri dan substitusi impor kiranya perlu terus digelorakan, agar dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Ketidakpastian dan kerapuhan ekonomi dunia akibat perang dagang AS dan China masih berlanjut meskipun relatif berkurang dibandingkan dengan tahun 2018. Dengan kondisi tersebut, investor besar diperkirakan akan mempertimbangkan tempat yang menjadi basis produksi, diantaranya Indonesia, peluang ini harus dapat dimanfaatkan, dengan menjadikan Indonesia agar menarik bagi investor, nilai tambah yang telah kita miliki adalah persepsi investor yang melihat adanya keberlanjutan fokus kebijakan ekonomi dan pembangunan dalam pemerintahan mendatang.

Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan beragam terobosan kebijakan yang telah ditempuh pemerintah dalam memastikan meningkatnya investasi, seperti Online Single Submission/OSS) dipastikan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah. Disamping itu, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, diharapkan akan terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan kemudahan berusaha.

Pemberian insentif dilakukan dengan memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, serta pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah. Disamping itu dilakukan juga pemberian bantuan modal, bantuan untuk riset dan pengembangan, dan bantuan fasilitas pelatihan vokasi kepada UMKM dan/atau koperasi daerah dan bunga pinjaman rendah.

Kita tentunya berharap K/L dan Pemerintah Daerah dapat menyatukan sinergitas dalam memastikan berbagai regulasi dan kelembagaan yang dirancang untuk memudahkan Bergeraknya investasi tersebut dapat benar-benar berjalan di tataran praksis, sehingga dipastikan adanya jaminan kecepatan dalam mengeluarkan izin terhadap kegiatan usaha dan investasi yang berkaitan dengan industrialisasi, industri produk substitusi impor, dan industri berorientasi ekspor serta yang lebih penting adalah dapat dipastikan pengawalan yang terukur terhadap proses dan realisasi usaha dan investasi yang sudah menerima izin.

Kedepan diharapkan upaya menarik investasi seyogyanya dapat terus fokus pada investasi padat karya, industri pengolahan sumber daya alam, dan industri yang berorientasi ekspor.

Indonesia membutuhkan industri dengan serapan tenaga kerja yang tinggi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan penyerapan tenaga kerja, sehingga investasi yang lebih kepada investasi yang padat karya dan industri pengolahan. Misalnya investasi di industri makanan dari bahan baku hasil perikanan memang tidak memiliki nilai yang cukup besar. Namun, keberadaannya dapat membawa *multiplier effect* atau efek pengganda terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan nelayan dan hasil produksinya bisa diekspor untuk mendongkrak devisa.

Demikian pula dengan pengembangan investasi di sector makanan dan minuman, mengingat kontribusinya terhadap PDB, dimana dari data yang dilansir Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Januari-Juni 2019 industri makanan dan minuman memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), sumbangan terhadap ekspor, dan penyerapan tenaga kerja mencapai Rp 31,9 triliun. Angka ini berkontribusi sebesar 8,1 persen dari total investasi. Dukungan investasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia ditengah keterbatasan APBN menjadi pilihan strategi yang sangat tepat ditengah kelesuan ekonomi global.

Kualitas investasi ke depan harus terus mendapatkan perhatian utama, manfaat dan keuntungan dari investasi yang masuk sangat dipengaruhi oleh kualitas investasi, agar dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, yang memiliki efek berantai terhadap penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pada sektor industri pangan, pertanian perkebunanserta sektor perikanan.

Kalangan perbankan harus didorong untuk mendukung investasi-investasi sektor riil dan infrastruktur, terutama di daerah Indonesia bagian timur, perbankan diharapkan dapat proaktif jemput bola dan mendukung proses kegiatan ekonomi. Upaya memberikan kemudahan investasi, kepastian hukum dan jaminan keamanan, melalui perbaikan berbagai regulasi yang telah akan dikeluarkan, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus menciptakan keterbukaan investasi.

Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ditengah keterbatasan APBN, menjadi pilihan strategi yang tepat dalam membalikkan pelambatan ekonomi melalui, optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan Indonesia menjadi Negara Maju (Eddy, 2019).

### **1. Sumber Daya Manusia yang Unggul**

Persaingan ketat dalam era globalisasi sudah tidak dapat terelakkan sehingga semua dimensi, semua golongan masyarakat dan dunia terlibat di dalamnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu mempersiapkan masyarakat berkualitas unggul dengan melibatkan dunia pendidikan. Pendidikan merupakan sarana paling tepat untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Kebutuhan terhadap pendidikan yang bermutu merupakan tuntutan terhadap kemajuan suatu bangsa di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini. Suatu bangsa yang tidak

menguasai IPTEK akan terlindas dan tertinggal dalam persaingan global yang begitu keras dan ketat.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan dalam mempersiapkan masyarakat unggul pada era globalisasi, maka perlu strategi pengembangan SDM melalui strategi pelatihan dan pengembangan (*learning and development/ L&D strategy*) yang berpegang dan bertumpu pada landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan merupakan usaha yang dilandasi kesadaran dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran dan suasana belajar. Untuk pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan tentu harus didukung pula dengan sistem pendidikan dan strategi pengembangan kompetensi yang baik pula. Untuk pencapaian kompetensi tersebut, penyelenggara pendidikan perlu membangun strategi pengembangan SDM melalui pelatihan dan pengembangan yang perlu ditangani secara serius dan berkesinambungan.

David Hayden dalam sebuah artikel pada CIPD (2018) mengatakan: “*A learning and development strategy outlines how an organisation develops its workforce’s capabilities, skills and competencies to remain successful. It’s an important part of an organisation’s overall business strategy and its policies*”, artinya betapa pentingnya *L&D strategy* sebuah organisasi harus dikembangkan karena sangat berpengaruh untuk keberhasilan sebuah organisasi dalam menghadapi persaingan global (Ramot Peter, 2020).

Visi Indonesia maju membutuhkan adanya lompatan besar dalam merancang strategi pembangunan nasional, utamanya untuk memastikan terjadinya akselerasi pencapaian Indonesia maju dengan GDP ke-5 terbesar pada 2045.

Bila mencermati berbagai capaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, sesungguhnya kita telah memiliki modal awal untuk menuju Indonesia maju, indikatornya antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil diatas 5%, menurunnya angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin, rendahnya tingkat ketimpangan berdasarkan indeks Gini Ratio serta bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

Kita telah memiliki pondasi yang kokoh untuk mencapai cita-cita Indonesia maju tersebut, sebagai buah dari masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, kita dapat menyaksikan berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah mulai dirasakan manfaatnya dalam mendorong bergeraknya ekonomi regional.

Pembangunan infrastruktur secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ini digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau “*middle income trap*”.

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas ekonomi.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, kita tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam hal tersebut meliputi jalan, jembatan, dan pengairan dan lainnya (Mankiw, 2003). Sedangkan menurut *The Routledge Dictionary of Economics* (1995) memberikan pengertian yang lebih luas lagi yakni peran strategis infrastruktur sebagai pelayan utama dari suatu Negara dalam membantu Bergeraknya roda kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat, diantaranya melalui penyediaan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, lebih lanjut dijelaskan dalam Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas.

Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan *social overhead capital* atau barang-barang modal yang menjadi dasar atau sarana penting bagi keperluan-keperluan masyarakat yang secara tidak langsung kemudian bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi.

Selain itu, pada penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh David Aschauer (1989) dengan menggunakan model produksi *Cobb-Douglas*, diperoleh hasil bahwa terdapat korelasi positif antara investasi infrastruktur dengan produktivitas output yang dihasilkan. *Core infrastructure* seperti transportasi, energi, dan air memiliki dampak yang lebih besar dari pada infrastruktur lain seperti bangunan dan rumah sakit.

Dari berbagai ilustrasi di atas menjadi jelaslah bahwa keberlanjutan pembangunan infrastruktur, yang menjadi dasar lompatan ekonomi Indonesia menuju negara maju, menjadi penting untuk kita sukseskan implementasinya, dengan terus membangun kontribusi positif dan sinergitas diantara seluruh pemangku kepentingan sebagai perwujudan spirit *Indonesia incorporated*.

Kita patut mengapresiasi langkah strategis Presiden Jokowi dengan menjadikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar dalam Visi Indonesia Maju pada periode kedua pemerintahannya, keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada upaya memastikan terjalannya konektivitas dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan lainnya perlu terus didukung agar terjadi akselerasi keberlanjutan implementasinya.

Langkah strategis ini diyakini akan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, karena keberlanjutan pembangunan infrastruktur memainkan peranan vital dalam sektor ekonomi, hal tersebut didukung oleh World Bank (1994) yang menyatakan bahwa peningkatan

stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 1 persen. Hal tersebut berarti semakin besar pembangunan infrastruktur, semakin besar pula potensi peningkatan PDB.

Dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang fokus pada upaya menyambungkan dengan sentra-sentra produktif ekonomi rakyat, akan mampu menggerakkan perkembangan ekonomi regional dengan lancarnya konektivitas antara satu wilayah dan daerah lain, diharapkan laju distribusi barang akan semakin lancar. Sehingga harga barang akan semakin kompetitif dan terjangkau dan secara ekonomis serta akan meningkatkan daya saing produk-produk ekonomi lokal dan tumbuhnya pusat bisnis baru di berbagai wilayah secara merata.

Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur ekonomi juga sangat diperlukan untuk menggeser ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis investasi, konektivitas yang tersambung akan menurunkan biaya logistik dan mendorong bergairahnya investasi produktif pada berbagai wilayah.

Tercipta peningkatan produktivitas dan memberikan *multiplier effect* atau efek pengganda yang lebih besar karena akan tumbuh investasi yang dapat menunjang berkembangnya industri pengolahan, sehingga kita tidak selamanya kita tergantung pada ekspor sumber daya alam mentah.

Kita tentunya berharap dengan adanya akselerasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan dapat dapat membawa manfaat yang lebih besar pemerataan pembangunan, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Kebijakan ekonomi Indonesia harus terus diarahkan untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran

Memacu akselerasi pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli ekonomi pembangunan, Rosentein-Rodan misalnya, sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama *big-push theory*.

Beberapa hasil studi juga menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Kita tentunya berharap, berbagai inovasi pembiayaan dapat terus dilakukan, utamanya dalam memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur tetap dalam dipacu ditengah keterbatasan keuangan dalam APBN dengan merancang skema pembiayaan yang lebih "luwes", *spirit entrepreneur* dalam pengembangan pembiayaan kreatif, seyogyanya menjadi pengarusutamaan dalam pembiayaan.

Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta diharapkan terlibat aktif mendanai infrastruktur. Spirit kerjasama bahu membahu, diharapkan dapat terus ditingkatkan perwujudannya agar dapat mempercepat keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, dampak kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan publik.

Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur sebagai bentuk inovasi, perlu terus diupayakan dengan manajemen resiko yang terukur, antara lain melalui pola LCS (*Limited Concession Scheme*). Pola dimaksud, yaitu pembiayaan proyek melalui sumber dana swasta atas pemberian konsesi, dari suatu aset infrastruktur milik Pemerintah/BUMN yang sudah beroperasi kepada pihak swasta terkait.

Perlu terus dikembangkan penyiapan proyek berstandar internasional, dalam bentuk dokumen pra studi kelayakan atau *Outline Business Case (OBC)*. Juga penetapan skema pendanaannya, nilai investasi, tingkat pengembalian investasi, keuntungan finansial yang akan didapat. Termasuk di dalamnya adalah fasilitas yang ditawarkan pemerintah serta proyeksi resiko investasi.

Disamping itu, perlu terus didorong berkembangnya kerjasama dalam bentuk konsesi proyek-proyek BUMN yang sudah matang dan telah menghasilkan keuntungan. Seperti, antara lain melalui strategi menjual surat utang atau obligasi, yang basisnya dari keuntungan atas aset tersebut atau menjual konsesi proyek infrastruktur.

Pengembangan berbagai *creative financing* sangat diperlukan untuk mengurangi beban APBN dan sekaligus mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN). Sekuritisasi aset dapat dipertimbangkan, dengan melakukan sekuritisasi aset. Seperti melepas sebagian haknya atau menerbitkan surat utang atas asetnya yang produktif. Dengan begitu, BUMN akan mendapatkan dana lebih banyak untuk merealisasikan proyek infrastruktur baru.

Tujuan dari berbagai inovasi pembiayaan dimaksud, agar pembangunan infrastruktur yang sudah jalan dapat dikembangkan lagi asetnya oleh swasta. Lalu uangnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang lain. Jadi berbagai komentar miring yang mengatakan bahwa pemerintah menjual aset negara secara ugal-ugalan, adalah tidak mendasar sama sekali. Pasalnya, karena esensinya sekuritisasi aset itu hanya menjual *future income*, bukan menjual aset.

Kita tentunya berharap dengan berjalannya strategi pembiayaan dengan *model financing creative*, keberlanjutan pembangunan infrastruktur dapat semakin masif lagi di seluruh wilayah di Indonesia, akan tercipta integrasi ekonomi, sehingga biaya logistik di Indonesia dapat diturunkan, regional ekonomi dapat berkembang secara adil, disparitas harga dapat ditekan, sekaligus menaikkan daya saing ekonomi Indonesia.

Masifnya keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini kita harapkan dapat terus dijamin keberlanjutannya guna mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia dan berkontribusi positif dalam mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan ekonomi produktif rakyat, sehingga seluruh wilayah di Indonesia menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global (*regional and global production chain*) yang berperan dalam memeratakan pembangunan dan

keadilan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI, sehingga visi Indonesia maju melalui pilar keberlanjutan pembangunan infrastruktur dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju 2045.

### Simpulan

Mewujudkan Indonesia Emas atau Indonesia maju pada 2045 bukan hal yang mudah. Semua butuh kerja keras di berbagai lini vital strategi sebuah negara. Indikator-indikator penting sangat menentukan untuk kemajuan Indonesia. Pengendalian Inflasi, negara bisa naik beberapa persen menuju status maju jika pemerintah mampu mengendalikan tingkat inflasi, itu sangat berpengaruh bagi pengembangan perekonomian Indonesia. Pengendalian Kemiskinan, sebuah negara akan dikatakan maju apabila tingkat kemiskinan rata-rata dibawah 10 persen bahkan 5 persen di sebuah negara, butuh kerja keras pemerintah untuk menekan garis kemiskinan yang salah satu caranya menyediakan lapangan pekerjaan yang merata dan luas di segenap penjuru negeri, pemerintah harus berdiplomasi dengan para konglomerat-konglomerat yang ada di Indonesia guna Bersatu membangun lapangan pekerjaan untuk rakyatnya yang masih sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Investasi dan arah kebijakan, Investasi adalah modal utama bagi bangsa, karena jika Masyarakat luas pandai dalam hal investasi bukan tidak mungkin itu akan mendongkrak standar perekonomian suatu bangsa berada di titik atas lebih baik jika dibandingkan belum menerapkan investasi. Sumber Daya Manusia yang unggul, tidak diragukan lagi, indikator selanjutnya adalah SDM yang unggul, karena kalau kita melihat ke negara Cina atau Jepang, SDM mereka unggul, mulai dari jam kegiatan belajar di sekolah, kedisiplinan kepada Individu atau peraturan negara, dll. Pembangunan Infrastruktur yang fungsional, Pembangunan yang fungsional sangat penting untuk perkembangan kemajuan suatu negara, contohnya Kota Jakarta berpenduduk 2000 jiwa, pemerintah mengalkulasikan berapa kira-kira stasiun kereta api yang dibutuhkan melihat jumlah dan Masyarakat Jakarta yang setiap harinya menggunakan transportasi umum berupa kereta.

### Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincon. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Asian Development Bank (ADB). (2023). *Asian Development Outlook 2023: Indonesia*. Manila: ADB.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia (BI). (2023). *Laporan Ekonomi dan Keuangan 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Eddy Cahyono Sugiarto, (2019), *Investasi dan Indonesia Maju*, Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Bogor.
- Elfansyah, Novel (2006). *Survei BI-Unmul, IKK Naik 3,6 Persen*. *samarinda.gov*. Pemerintah Kota Samarinda. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-28. Diakses tanggal 2009-10-19.

- Gischa, Serafica (2020). Gischa, Serafica, ed. Pengertian Inflasi: Indikator, dan Pengelompokan. *Kompas.com*. Diakses tanggal 2020-10-16.
- Hill, H., & Tabor, S. R. (2018). *Indonesia's Economic Development: Progress and Challenges*. Canberra: ANU Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *APBN 2023: Percepatan Pemulihan Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Visi Indonesia 2045: Menjadi Negara Maju*. Jakarta: Bappenas.
- Parwoto. (2001). *Kemiskinan*. Bappenas. Jakarta
- Purnomo, H. (2020). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Strategi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putri Keumala Sari, Fakhruddin. (2009) Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Tahun (1997-1998 dan 2008) . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*. 1 (2): 379–380.
- Ramot Peter, (2020), *SDM Unggul Dalam Menghadapi Era Globalisasi*
- Resosudarmo, B. P., & Abdurrohman, A. (2018). *Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan dan Kesenjangan Regional*. Jakarta: CSIS.
- Rosyidi, Suherman. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. Kediri: IAIN Kediri Press.
- Rofiqoh, I., & Zuhawati. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiharto, T. (2019). *Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: UI Press.
- Times, I. D. N.; Agustina, Auriga. (2014) *Ini Penyebab Inflasi dan Dampaknya terhadap Negara*. IDN Times. Diakses tanggal 2020-10-16.
- Todaro, P. Michael. (2000). *Economic Development*. New York University
- Ulya, Fika Nurul (2020). Jatmiko, Bambang P., ed. Gubernur BI: Cetak Uang kemudian Dibagikan ke Masyarakat? Enggak Ada Itu!. *Kompas.com*. Jakarta: Kompas.com. Diakses tanggal 2021-01-05.
- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Quarterly: Navigating the Pandemic*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Sage Publications.